

Peranan GCG Dan Struktur Kepemilikan Dalam Meminimalisir Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI

Andrew Gunawan
Universitas Katolik Musi Charitas
andrew@ukmc.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 9 Juni 2022
Disetujui : 30 Juni 2022
Dipublikasi : 1 Juli 2022

ABSTRACT

Agency costs are a problem for most companies, especially for manufacturing companies. Indeed, agency costs arising from deviant management practices can be minimized with good corporate governance or what is known as good corporate governance. One form of good governance is the existence of an independent board of commissioners that functions as a supervisory mechanism in the company. In addition, the ownership structure also has its own role to overcome this problem. This study aims to see how the role of good corporate governance and ownership structure in minimizing agency costs in a company. The method used in this study is multiple linear regression analysis, the result is the proportion of independent commissioners and institutional ownership has no significant effect on agency costs.

Keywords: *agency costs, good corporate governance, the proportion of independent commissioners*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan industri khususnya di sektor manufaktur telah berkembang sangat pesat, hal tersebut tidak luput dari pemanfaatan sumber daya alam yang baik, tenaga kerja yang melimpah, dan juga teknologi yang memadai. Namun dengan seiring perkembangan perusahaan manufaktur yang sangat pesat juga menimbulkan masalah baru, yaitu masalah keagenan. Salah satu masalah yang timbul di antara manajer atau manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal), yang menimbulkan perbedaan pandangan dan disinformasi. Masalah ini kerap timbul di karenakan manajer merasa kurangnya insentif yang diterima justru lebih mementingkan kepentingan sendiri. Hubungan keagenan sekali lagi terjadi pada saat prinsipal mempekerjakan agen dan sekaligus memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan. Dalam perusahaan di mana manajernya memiliki saham kurang dari 100% akan terjadi hubungan keagenan dengan konsekuensi potensial terjadi konflik keagenan. Perusahaan untuk memperkecil konflik keagenan tersebut harus mengeluarkan Biaya yang kemudian dinamai dengan Biaya keagenan atau *agency cost* (Budiarti, dkk 2014).

Masalah keagenan itu juga terjadi karena pemilik hanya memiliki akses terhadap relatif sebagian kecil informasi yang tersedia bagi eksekutif mengenai kinerja perusahaan dan tidak dapat mengawasi seluruh keputusan atau tindakan eksekutif, maka sering kali eksekutif bebas mengejar kepentingannya sendiri. Kondisi ini dinamakan masalah bahaya moral (*moral hazard problem*). sebagai akibat dari masalah bahaya moral, eksekutif mungkin merancang strategi yang memberikan manfaat terbesar bagi diri sendiri, dengan menempatkan kesejahteraan organisasi sebagai prioritas sekunder. Misal eksekutif mungkin menjual produk lebih awal di akhir tahun untuk meningkatkan bonus mereka meskipun diskon besar yang harus ditawarkan

akan mengancam stabilitas harga produk perusahaan di tahun berikutnya. Demikian pula, eksekutif yang tidak diawasi mungkin mencoba mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan bermalasan-malasan, mengubah ramalan untuk memaksimalkan bonus kinerja; menilai perusahaan yang dijadikan target akuisisi secara tidak realistis guna meningkatkan kemungkinan untuk memperbesar ukuran organisasi melalui akuisisi tersebut atau memanipulasi catatan karyawan untuk mempertahankan atau merekrut karyawan inti perusahaan.

Penyebab utama kedua yang menimbulkan biaya keagenan adalah seleksi yang salah (*adverse selection*). Hal ini mengacu pada keterbatasan dari kemampuan pemegang saham untuk secara tepat menentukan kompetensi dari prioritas eksekutif ketika mereka direkrut karena para pemilik tidak dapat melakukan verifikasi awal atas kelayakan seorang eksekutif sebagai agen dari pemilik, maka masalah perebedaan prioritas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya antara pemilik dan agen sangat mungkin terjadi (*Robinson, 2008*).

Salah satu faktor yang mampu meminimalisir dari timbulnya biaya keagenan tersebut adalah dengan penerapan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governace (GCG)*. *Good corporate governance (GCG)* adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Sementara definisi *good corporate governance (GCG)* sesuai dengan surat keputusan BUMN No. 117/2002 merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good corporate governance (GCG)* adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.

Salah satu perwujudan dari *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu dewan komisaris independen. Menurut Pranita (2018), komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambil keputusan oleh dewan komisaris. Peran dewan komisaris independen sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *good corporate governance*. Fungsi utama dewan komisaris menurut *Indonesian Code for Corporate Governance* adalah memberikan supervisi kepada dewan direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan komisaris juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran ketika di minta oleh dewan direksi. Selain dari dewan komisari independen Struktur kepemilikan juga memiliki pengaruh ke biaya keagenan. Dalam hal ini suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham, Faisal (2005) dalam Sarafina (2017). Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Sarafina (2017) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan dan kepentingan institusional adalah dua mekanisme yang dapat mengendalikan masalah keagenan yang ada di suatu perusahaan. Salah satu faktor yang ada dalam struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional, adalah kepemilikan saham pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. Al 2006) dalam wijayanti (2015). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa struktur kepemilikan dapat berpengaruh terhadap biaya keagenan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian (Aga nugroho, dkk,

2012) dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Biaya Keagenan bahwa dalam penelitiannya komposisi dewan komisaris, kepemilikan institusi, terhadap biaya keagenan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan ATO (rasio perputaran *asset*) sebagai ukuran variabel.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian (Krisnauli, 2014) menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya keagenan dengan ATO (peningkatan perputaran *asset*) sebagai ukuran variabel. Hal tersebut di tunjukkan semakin tinggi jumlah atau ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula rasio perputaran *asset* yang dihasilkan perusahaan. Peningkatan perputaran *asset* (ATO) menandakan kinerja manajemen yang baik dan minimnya masalah keagenan yang terjadi di perusahaan, sehingga biaya keagenan yang timbul juga dapat ditekan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan (aga nugroho, dkk. 2012) mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian (Krisnauli, 2014).

Berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil kembali judul penelitian Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG) dan Struktur Kepemilikan terhadap Biaya Keagenan*

STUDI LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi ini menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Krinauli (2014) menyatakan bahwa teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan satu orang (*agent*). Secara garis besar digambarkan dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Menurut Lukviarman dalam *Agency Theory* merupakan perspektif yang jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu adanya konflik kepentingan dalam perusahaan.

Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan dari prinsipal, dalam hal ini tujuan dari prinsipal ialah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Dikarenakan informasi yang lebih banyak dimiliki oleh pihak manajer ini dapat memicu mereka untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri seperti agar dapat dinilai kinerjanya baik maka mereka cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, bagi mereka akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen ini karena kurangnya informasi yang ada. Maka dari itu, terkadang beberapa kebijakan tertentu yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak pemilik modal atau investor.

Teori Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana pihak manajer (*agent*) mempunyai lebih banyak informasi atas kondisi suatu perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*). Dalam Teori Agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan dan pemegang saham (*principal*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional dalam hal ini ialah pihak manajer (*agent*) yang lebih mengerti dan memahami cara menjalankan usaha.

Kondisi ini cenderung dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) antara pihak manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan dan pemegang saham (*principal*). Ketika ketidakseimbangan informasi ini tinggi, maka pemegang saham tidak dapat memiliki sumber daya yang cukup, intensif, ataupun akses atas informasi yang relevan untuk mengontrol tindakan manajer ini, dimana hal ini akan membuat pihak manajer memiliki kesempatan untuk melakukan praktik kecurangan dalam perusahaan seperti halnya penghindaran pajak. Maka dari itu perlu diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat

membantu memperlemah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan ini, salah satunya dengan adanya peran dari dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen inilah yang nantinya akan mengawasi aktivitas perusahaan serta bertindak manajemen dan juga dewan komisaris ini cenderung lebih menghindari praktik – praktik negatif yang terjadi di dalam perusahaan karena bila terjadi praktik negatif dalam perusahaan maka citra perusahaan akan menjadi buruk, pihak dewan komisaris independen ini tidak menginginkan hal itu terjadi.

Good Corporate Governance

Tujuan utama dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan peringatan awal, mengembalikan organisasi sebelum mencapai tingkat kritis. Dewan komisaris dalam hal ini merupakan pihak sebagai penanggungjawab final dalam fungsi perusahaan . Sistem *corporate governance* sangat kompleks dan terintegrasi sehingga diperlukan suatu mekanisme. Mekanisme pengendalian pada *corporate governance* dirancang untuk mengurangi ketidakefisienan kinerja manajemen perusahaan yang timbul karena *moral hazard*, kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Dalam hal ini, direksi harus memiliki sistem dan pengawasan di luar organ internal yang mengawasi bidang keuangan, operasional, *risk management* dan kepatuhan. Keseluruhan tugas ini menjadi tanggungjawab komite audit dan dewan komisaris independen. Dari pernyataan diatas, maka dapat didefinisikan mekanisme *corporate governance* menjadi suatu hubungan antara beberapa organ terkait, seperti: proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, proporsi komite audit yang independen. Dewan komisaris merupakan puncak dalam sistem pengelolaan internal sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Peran dari dewan komisaris diantaranya adalah menjamin pelaksanaan strategis perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewujudkan terlaksananya transparansi. Peran dewan komisaris akan didukung bila dalam pelaksanaannya mereka melakukan tugasnya secara independen, sehingga akan meningkatkan tingkat transparansi dalam *voluntary disclosure*.

Dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi juga ditengarai memiliki peranan penting dalam pengawasan praktik negatif seperti penghindaran pajak. Hal ini dikarekan mereka lebih peka dan mengetahui kebutuhan informasi apa saja yang diperlukan oleh *stakeholder* dalam penilaian terhadap perusahaan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk memberikan sinyal positif berupa transparansi informasi, khususnya informasi keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan sentimen positif pula oleh *stakeholder*. Pengendalian yang baik akan mengakibatkan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi

Biaya Keagenan

Pengukuran biaya agensi dengan perputaran aktiva. Biaya agensi yang diprosikan dari perputaran aktiva mengukur biaya keagenan berdasarkan *asset and total sales*, yaitu rasio aktiva terhadap total penjualan. Perputaran aktiva merefleksikan kebijakan manajerial untuk praktek efisien dalam perputaran aktiva. Semakin tinggi level akibat kebijakan manajerial, maka semakin rendah biaya keagenan yang terjadi. Biaya keagenan yang diukur dengan perputaran aktiva mengukur kemampuan manajer untuk menggunakan aktiva secara efisien. Tingkat perputaran aktiva yang tinggi merupakan indikasi bahwa manajer melakukan praktek efisien dalam manajemen aktiva dengan demikian akan meningkatkan nilai perusahaan. Faisal (2005) dalam Siti Hayati (2014). Jadi dengan adanya tingkat perputaran aktiva yang tinggi, manajer berhasil meningkatkan pendapatan perusahaannya, sehingga akan terjadi masalah transparansi karena para manajer berusaha tidak mempublikasikan keuntungan tersebut agar para pemegang saham tidak menuntut banyak kepada agen.

Hipotesis

1. Hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Biaya Keagenan.

Pada dasarnya salah satu hal dapat terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan adanya dewan komisaris independen di mana jumlah dewan komisaris independen ini dalam suatu perusahaan paling minimal 30% dari dewan komisaris. Pihak independen adalah pihak di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jadi dewan komisaris independen memonitoring segala kegiatan yang ada di suatu perusahaan tersebut dengan semakin ketatnya pengawasan yang di lakukan membuat tindak perilaku manajer yang menyimpang minim yang di mana ini dapat mengurangi biaya keagenan.

H₁ : Dewan komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan

2. Hubungan antara kepemilikan institusional dan Biaya Keagenan.

Dalam pengelolaan perusahaan pastinya pemilik atau pemegang saham membagi hal tersebut menjadi beberapa struktur yaitu struktur kepemilikan dimana di dalamnya di bagi lagi, salah satunya adalah kepemilikan institusional, menurut ross (2005) kepemilikan institusional adalah pengelompokan struktur hak yang dimiliki secara institusi atau bersifat berkelompok. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan ke dalam sebuah organisasi, tentu akan membuat sistem monitoring di dalam organisasi semakin tinggi. Hal tersebut dapat meminimalkan biaya keagenan yang ditimbulkan oleh agen/manajer.

H₂ : kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Biaya keagenan

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur adalah karena aktivitas operasional dan non operasional yang ada di perusahaan manufaktur jauh lebih kompleks dari perusahaan lainnya.

Dimana Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* pemilihan sebagai teknik dalam pengambilan sampel. Kriteria yang digunakan untuk mendapatkan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang tidak di *delisting* sepanjang periode 2018-2020, hal ini di karenakan apabila perusahaan tersebut di *delisting* data yang tersedia tidak bisa di pastikan keabsaanya dan tidak bisa dipatikan kebenarannya lagi.
2. Perusahaan yang datanya tidak lengkap pada tiap tahun, karena data yang tidak lengkap tidak dapat di masukan kedalam penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data arsip (*archival*) dapat berupa data primer atau data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data di basis data menurut Hartono (143, 2013)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan dalam analisis ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Dimana:

Y : Variabel dependen (Biaya Keagenan)

X1 : Variabel independen (dewan komisaris independen)
X2 : Variabel independen (kepemilikan institusional)
b1–b2 : Angka arah atau koefisien regresi
a : *intercept* atau konstanta
e : residual

HASIL

Deskripsi Penelitian

Berdasarkan pada seleksi sampel berdasarkan kriteria penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, maka didapatkan jumlah sampel yang memenuhi syarat sebesar 420 data. Adapun rinciannya ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 1
Penentuan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
1.	Jumlah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode pengamatan	144
2.	Jumlah Perusahaan yang di delisting selama masa periode penelitian	(0)
3.	Periode pengamatan 3 tahun	432
4.	Jumlah data perusahaan yang tidak lengkap per tahun (periode)	(12)
Total sampel penelitian yang di olah		420

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwasannya terdapat 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sepanjang 2018-2020 sehingga total menjadi 432 data. Namun dari 432 data ini ada 12 data perusahaan yang tidak tersedia sehingga harus dieliminasi.

Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini juga di lakukan analisis statistik deskriptif yaitu untuk mengetahui bentuk data penelitian dan menguji generalisasi hasil penelitian berasarkan satu sample, Hasan (2004:185) dalam Leni (2017). Maka dari itu statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-Rata	Minimum	Maksimum
KDI	420	0,406667	0,0000	1,0000
INST	420	0,702656	0,0000	0,9978
ATO	420	1,009730	0,0000	8,4293

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah sampel sebanyak 420 karena periode penelitian selama 3 tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa biaya keagenan yang di ukur dengan *asset turn over* (ATO) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 1,009730 dari jumlah 420, dengan batas minimum 0,0000 dan batas maksimum 8,4293.

Kepemilikan institusional yang dapat dilihat dengan INST memiliki nilai rata-rata sebesar 0,702656 dengan batas minimum sebesar 0,0000 dan batas maksimum sebesar 0,9978. Di lihat dari tabel 4.2, untuk variabel komisaris dewan independen di wakikan dengan KDI dapat di lihat dengan nilai rata-rata sebesar 0,406667 dari jumlah 420, dengan batas mininum sebesar 0,0000 dan batas maksimum sebesar 1,0000.

Uji Normalitas Data

Peneliti melakukan Uji normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov-Spinov test*. Uji dilakukan dengan melihat angka probabilitas yang dihasilkan yaitu:

1. Nilai signifikansi atau nilai distribusi < 0,05 distribusi tidak normal
2. Nilai signifikansi atau nilai distribusi > 0,05 distribusi normal

Tabel 4.1 Uji Normalitas Residual

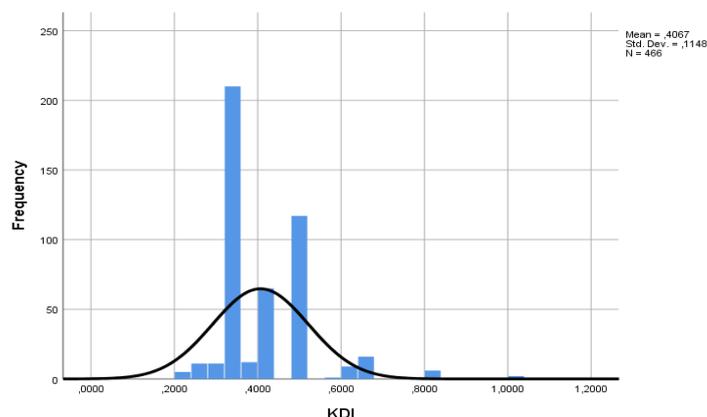
Keterangan	Hasil
Jumlah sampel	420
Asymp. Signifikan	0,000

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel hasil olah data di bawah tersebut dapat di lihat bahwa data dari ketiga variabel tersebut saat diuji menggunakan *One Sample Kolmogorov-Spinov test* menunjukkan nilai Asymp.sig tiap variabel lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Maka ada cara lain dengan mencari nilai residual dari variable yang ada lalu diuji kembali menggunakan *One Sample Kolmogorov-Spinov test* yang menunjukkan nilai 0,000 tidak lebih besar dari 0,05. Maka dari data tidak normal tersebut peneliti memutuskan memperbaiki data dengan metode lain yaitu metode transform.

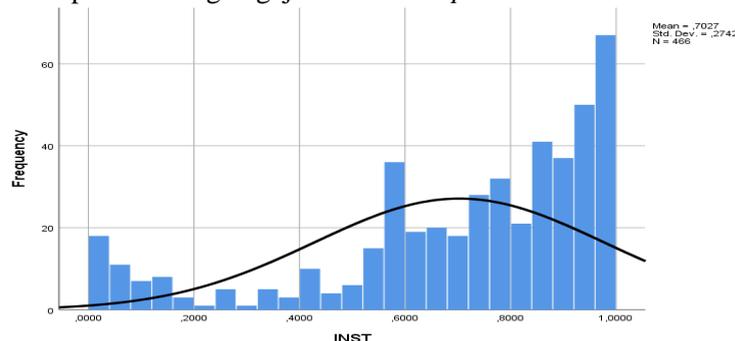
Perbaikan data dengan metode Transformasi

Setelah menguji normalitas data dan residual data tetap tidak normal maka metode yang digunakan untuk membuat data normal yaitu dengan metode transform, dimana dari ketiga variabel yang tadi di lihat dulu permasalahannya dengan cara *graphic, Legacy dialogs, histogram*. Dengan menggunakan *graphic* tersebut kita dapat mengetahui permasalahan dari masing-masing variabel dimana pada variabel Dewan Komisaris Independen mengalami gejala *moderate positive skewness*, pada variabel Kepemilikan Institusional mengalami gejala *moderate negative skewness*, dan untuk variabel Biaya Keagenan mengalami gejala *moderate positive skewness*. Setelah mengetahui gejala- gejala barulah di *Transform, Compute Variable*. Dan di lakukan uji normalitas menggunakan metode *transform* data tetap tidak normal dengan nilai Asymp.sig tiap variabel lebih kecil dari 0,05. Dan setelah di lakukan uji residual dengan metode *transform* nilai Asymp.sig tetap di bawah 0,05. Maka dari itu dilakukan uji data tidak normal menggunakan metode *outliers*.



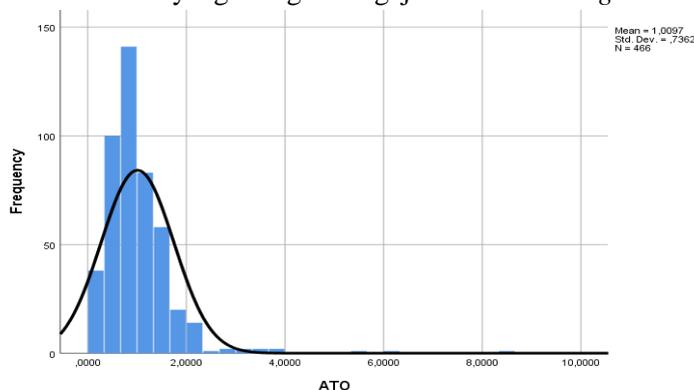
Gambar 1
Grafik Histogram Komisaris Independen

Variabel komisaris independen dengan gejala *moderate positive skewness*



Gambar 2
Grafik Histogram Kepemilikan Instutisional

Variabel kepemilikan instutisional yang mengalami gejala *moderate negative skewness*



Gambar 3
Grafik Histogram Biaya Keagenan

Variabel biaya Keagenan yang mengalami gejala *moderate positive skewness*.

Tabel 2
Uji Normalitas Residual Model Transformasi

Keterangan	Hasil
Jumlah sampel	420
Asymp Signifikan	0,002

Sumber: data Sekunder yang di olah, 2020

Perbaikan data tidak normal dengan metode *Outliers*

Dari pengujian data tidak normal menggunakan metode *transform* dan data masih tidak normal maka dilakukan metode perbaikan data yang lain yaitu dengan metode *outliers* dimana metode ini tidak seperti metode sebelumnya yang dilakukan dalam pengujian yaitu dari *analyze, descriptive statistic, descriptive*. Pada bagian variabel masukan variabel yang belum di *transform*-kan dan setelah diuji kita mengetahui nilai *Z score* masing-masing variabel menurut (Imam Gozali) bahwa penelitian sampel besar yaitu lebih dari 80 data dengan nilai *Z score* berada di luar *range* -3,5 sampai 3,5. Dan untuk sampel kecil kurang dari 80 data dengan nilai *Z score* berada diluar *range* -3,5 sampai 3. Dalam penelitian ini termasuk sampel besar dimana datanya lebih dari 80, dari pengamatan peneliti dengan nilai *Z score* yang tidak berada di *range* -3,5 sampai dengan 3,5 ada 4 maka dari 4 itu di eliminasi. Setelah itu di lakukan test residual metode *outliers* dapat di

lihat bahwa nilai Asymp.sig masih di bawah 0,05 maka data tersebut masih tidak normal, setelah 2 metode diatas masih tidak bisa menormalkan data maka metode terakhir yaitu dengan menggunakan metode *bootstraping*.

Tabel 3
Uji Normalitas Residual Metode Outliers

Keterangan	Hasil
Jumlah sampel	420
Asymp Signifikan	0,001

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Pengujian Regresi linear berganda dengan metode *Bootstraping*

Apabila data dalam penelitian sifatnya tidak normal maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu : melakukan bedah statistik dengan cara transform, Trimming, dan winsorize, & mengubah metode parametrik menjadi non parametrik. Menormalkan distribusi data menjadi berdistribusi normal banyak digunakan untuk tipe data interval dan rasio. Jika tipe data interval dan rasio tidak berdistribusi normal, maka pengujian statistiknya harus menggunakan pengujian nonparametrik Jogiyanto (2013). Dari langkah-langkah tersebut yang telah dilakukan dan data masih tetap tidak normal maka langkah terakhir adalah mengubah metode dari parametrik menjadi non parametrik dengan metode bootstrap. metode ini bisa digunakan bila data masih tidak normal setelah menggunakan metode *transform*, dan *outliers* maka metode terakhir yang digunakan untuk menormalkan data adalah metode bootstrap yang dilakukan adalah *analyze, regression, linear*. Dan masukan variabel utama yang belum di *transform* ataupun *outliers* . setelah di *bootstrap* hasil yang di dapatkan sebagai berikut:

1. Persamaan Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan dalam analisis ini adalah :

$$Y = 0,714 - 0,062 + 0,456 + e$$

Dimana:

- Y : Variabel dependen (Biaya Keagenan)
- X1 : Variabel independen (dewan komisaris independen)
- X2 : Variabel independen (kepemilikan institusional)
- b1-b2 : Angka arah atau koefisien regresi
- a : *intercept* atau konstanta
- e : residual

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R square
1	0,029	0,024

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Dapat dilihat pengujian koefisien determinasi bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0,024 yang artinya variabel Dewan komisaris independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya keagenan hanya mampu menjelaskan hubungannya sebesar 2,4% yang sisanya 97,6% di pengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian ini, tujuan pada penelitian ini lebih ke arah hubungan antara variabelnya bukan berdasarkan besarnya pengaruh variabelnya.

1. Uji kelayakan model penelitian (F test)

Uji F disebut juga dengan Uji Anova. Uji ini berguna dalam melihat hubungan antara variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian, uji statistic F. Pengujian dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 5
Uji F

Model	signifikan
Regression	0,001

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,001 yaitu di bawah 0,05 maka penelitian ini memenuhi uji F dan bisa di digunakan.

2. Uji Parsial (uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan α : 0.05.

Tabel 6
Uji t

Keterangan	B	Signifikan
Komisaris Dewan Independen	-0,062	0,824
Kepemilikan Institusional	0,456	0,001

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Dari tabel diatas, bisa di lihat dari nilai signifikansinya bahwa dari varibel komisari dewan independen dengan nilai signifikansi 0,824 artinya lebih dari 0,05 maka hipotesi pertama di tolak, dan untuk variabel kepemilikan institusional dengan nilai signifikansi 0,001 yaitu di bawah 0,05 maka hipotesi kedua diterima.

Pembahasan

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil dari hipotesis pertama dilihat dari nilai signifikansi dari variabel komisaris dewan independen lebih dari 0,05 yaitu 0,824 dan nilai koefisiennya -0,062 dimana dari penelitian ini dilihat bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan yang di ukuran dengan *asset turn over* (ATO) maka hipotesi di tolak. Hal ini disebabkan jumlah anggota komisaris dewan independen dalam suatu perusahaan masih belum memenuhi nilai batas minimal anggota dewan komisaris independen yaitu minimal 30% dari anggota dewan komisaris. Di lihat dari nilai minimum yang ada pada tabel 4.2 statistik deskriptif sebesar 0% yang artinya ada di beberapa perusahaan yang tidak memiliki dewan komisaris independen dimana fungsi dewan komisaris independen itu untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan dengan keputusan netral. Dari nilai rata-rata juga hanya sebesar 40,66% angka tersebut mendekati jumlah minimum jumlah dewan komisaris independen, yang artinya anggota dewan komisaris independen yang ada pada perusahaan manufaktur tidak bisa mengawasi segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan, karena jumlah yang masih sedikit dan juga disamping itu pemilik perusahaan yang masih kurang percaya terhadap dengan manajemennya sendiri sehingga, sehingga benturan konflik antara pemilik dan manajer ini tetap terjadi walau telah di awasi atau di monitor dewan komisaris independen, penerapan *good corporate governance* di dalam perusahaan masih belum sepenuhnya terwujud. Selain itu kebanyakan perusahaan masi seolah-olah menetapkan komisaris independen yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pengawasan dan peranan dalam meminimalisir biaya keagenan

menjadi lebih kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shael, dkk (2016) yang menyatakan bahwasannya peranan dewan komisaris independen di Indonesia belum optimal dalam meminimalisir biaya keagenan secara komprehensif.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil dari hipotesis kedua dilihat dari nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional kurang dari 0,05 yaitu 0,001 dan nilai koefisiennya 0,456. Dapat di lihat bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan yang positif dalam biaya keagenan yang diukur dengan *asset turn over* (ATO) maka hipotesis di tolak. Di lihat dari hasil penelitian ini maka terdapat anomali yaitu suatu temuan dalam penelitian bahwa kepemilikan institusional itu sendiri semakin tinggi persentasenya dalam suatu perusahaan bukannya mengecilkan biaya keagenan tapi semakin tinggi persentase kepemilikan institusional akan memungkinkan bagi para pengelola untuk mementingkan kepentingannya sendiri, karena kepemilikan institusi memiliki kuasa di dalam perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen. Dengan kata lain semakin tinggi persentase kepemilikan insitutisional maka tingkat biaya keagenan yang dikeluarkan juga ikut naik. Hal ini dapat di lihat pada tabel 4.2 bahwa nilai rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur itu sebesar 70,26% bisa di lihat bahwa dari rata-rata tersebut bahwa persentase kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur cukup tinggi. Secara praktis, anomali ini mungkin terjadi karena kepemilikan institusional yang tinggi justru menyebabkan konflik kepentingan menjadi lebih besar karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen seperti dalam konsep teori agensi. Contohnya, pemilik saham institusional (principal) menginginkan pembagian laba lebih besar dalam bentuk deviden, sementara manajemen perusahaan (agent) menginginkan laba perusahaan menjadi laba ditahan sebagai salah satu strategi untuk melakukan pengembangan usaha tanpa hutang dengan tujuan meminimalisir resiko eksposur modal karena beban hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handoko (2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di bab sebelumnya, maka hal yang dapat di sajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Komisari dewan independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan terkhususnya di perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan bahwa kinerja komisaris dewan indenpenden itu sendiri yang belum maksimal dan juga komisaris independen tidak dapat menangkap secara maksimial biaya keagenan yang di ukur dengan *Asset turn Over*.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan terkhususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini terjadi karena semakin tingginya persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan maka hal tersebut malah akan mengacaukan tata kelola perusahaan yang baik, hal ini terjadi karena kepemilikan institusional merupakan pihak investor jadi mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri, bila mereka menginginkan laba yang banyak maka mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin disamping besarnya biaya yang di dikeluarkan untuk manajer atau manajemen lain

REFERENSI

- Budiarti, Ella, & Sulistyowati, Chorry. (2014). *Struktur Kepemilikan dan Struktur Dewan Perusahaan*.
- Fasial. (2005). *Analisis Agency Cost , Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance*.
- Franita, Riska. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Friantin, Siti, Hayati, Elfi & Laksono, Julyartha Andhika. (2014). *Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Tahun 2010-2012*.

- Fu'ada, Tsamrotul. (2014). *Pengaruh Agency Cost Terhadap Kinerja Keuangan BUMN di Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET)*.
- Hadiprajitno, Krisnauli, P., Basuki. (2014). *Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost* (Studi Empiris Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012).
- Handoko, Jesica. (2015) *Pengaruh Struktur Modal dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Agency Cost Perusahaan LQ45 di BEI Tahun 2013*.
- Hartono, Jogiyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kusdewanti, Amelia, Indah. Triyuwono, Iwan & Djahmuri, Ali. (2014). *Teori Ketundukan: Gugatan terhadap Agency Cost*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Liyanto, L., W., & Anam, Hairul. (2019). *Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi*.
- Liu, Alfini, Maryanti., Irwansyah, & Fakhroni, Zaki. (2016) *Peran Agency Cost Reduction Dalam Memediasi Hubungan Corporate Social Responsibility Dengan Nilai Perusahaan*.
- Rahmawati, Syarifah. (2016). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Robinson, Jr., Richard B., & Pearce II, Jhon A., (2007). *Manajemen Strategis- Formula, Implementasi, dan Pengendalian*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, Nugroho, Aga & Syafruddin, Muchamad. (2012). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan* (Studi Empiris pada perusahaan keuangan terdaftar di BEI Tahun 2008-2010).
- Sarafina, Salsabila, & Saifi, Muhammad. (2017) *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)*.
- Shael, Ezra, & Murhadi, Werner, R., (2016). *Pengaruh Ownership Structure, Free Cash Flow, dan Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan*.
- Subagyo, Masrurroh, Nur, Aini, & Bastian, Indra. (2018). *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wijayanti, Fitri, Laela. (2015). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan*.